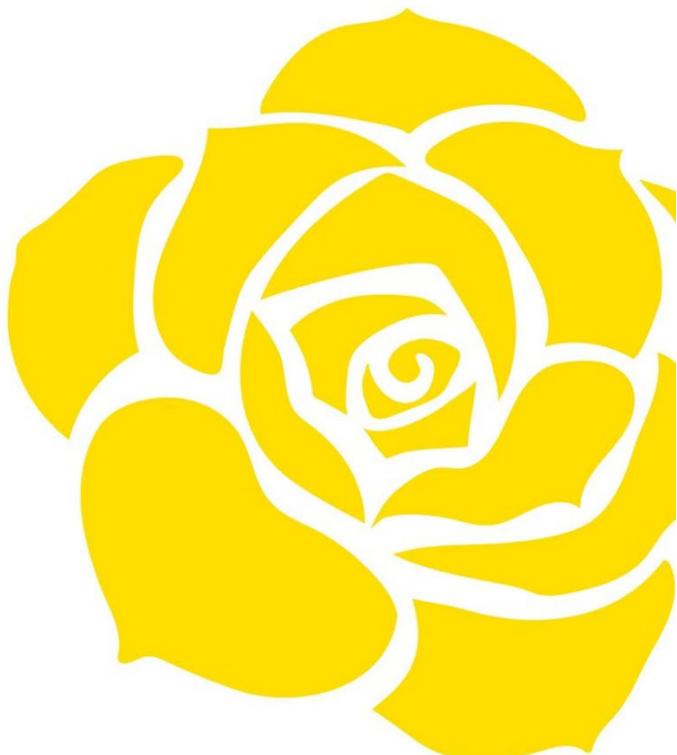


BUKU PUTIH NADIEM MAKARIM



Disusun oleh :
Tim Penasihat Hukum Nadiem Makarim



Daftar Isi	1
Lembar Fakta	2
Linimasa kebijakan pengadaan ChromeOS 2019-2025	4
Data Menunjukkan Pengadaan ChromeOS Tak Berhubungan dengan Investasi Google di PT AKAB	5
Terkait Grup WhatsApp “Mas Menteri Core Team”	7
Terkait Kerugian Negara	7
Terkait Kajian Teknis dan Pengadaan ChromeOS	9
Terkait ChromeOS dan Chromebook	19
Terkait Penggunaan ChromeOS & Windows di Kemendikbud	19
Terkait Pencopotan Direktur SD dan Direktur SMP	20
Terkait Kurikulum Merdeka atau Digitalisasi Pendidikan	21
Terkait Kewenangan Mendikbudristek	21
Terkait Dana CSR Google Partners Services Fund (PSF)	22
Terkait Konflik Kepentingan Investasi Google di Gojek/PT AKAB/PT GI/GoTo	23
Terkait Program dan Kinerja Nadiem Makarim	26
Kebijakan dan Pencapaian Nadiem Makarim	27



Kebijakan Pemilihan Chrome OS Mengikuti Semua Regulasi, Sudah Lolos Audit BPKP dan Bukan Tindak Pidana

Tidak Ada Kerugian Negara: Chrome OS Justru Menghemat APBN Setidaknya Rp1,2 T.

- Kalau pakai Windows OS, negara harus bayar lisensi ±Rp1,2 triliun (USD50×1,6 juta laptop), belum termasuk langganan manajemen perangkat per tahun. Sementara Chrome OS tidak memerlukan lisensi tambahan.
- Sebelum Nadiem menjadi Menteri, sistem operasi yang dipilih oleh Kemendikbudristek selalu Windows: tanpa kajian dan menggunakan lisensi berbayar. **Ketika Kemendikbudristek berlilih menggunakan Chrome OS yang gratis, mulai muncul resistensi serta tudungan praktik korupsi** walaupun proses sejak awal didampingi oleh JAMDATUN* (Kejaksaan Agung), BPKP**, LKPP*** serta KPPU****.

- Nadiem hanya terlibat dalam pemilihan sistem operasi dan tidak terlibat sama sekali dalam pembelajaran saat itu.
- Kebijakan pemilihan Chrome OS sebagai sistem operasional yang paling sesuai dengan kebutuhan pembelajaran saat itu adalah pilihan kebijakan dan bukan tindak pidana maupun tindak kriminal.

*JAMDATUN: Jakarta Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

**BPKP: Badan Pemeriksa Keuangan & Pembangunan

***LKPP: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bertanggung jawab kepada Presiden)

****KPPU: Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Nadiem Tidak Korupsi Sepeserpun. Kekayaannya Justru Merosot 51%* Saat Menjabat Menteri.

- Tidak ada bukti bahwa Nadiem menerima keuntungan pribadi atau memperkaya pihak lain.

- **Harga perangkat di e-catalog ditentukan oleh vendor dengan persetujuan LKPP****, yang mana setiap perangkat wajib memenuhi regulasi 25% TKDN***. Karenanya, tuduhan kerugian negara terkait mark-up harga laptop tidak ada hubungannya dengan kebijakan seleksi Chrome OS.

- **Tidak ada penunjukan langsung vendor dan Google tidak berpartisipasi dalam proses pengadaan, karena Google bukan vendor laptop.**

- Proses pengadaan sepenuhnya ditangani LKPP di bawah koordinasi Dirjen PAUD Dikdasmen****. LKPP bertanggung jawab kepada Presiden.

*Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

**LKPP: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

***TKDN: Tingkat Komponen Dalam Negeri

****PAUD Dikdasmen: Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah





Kebijakan Pemilihan Chrome OS Mengikuti Semua Regulasi, Sudah Lolos Audit BPKP dan Bukan Tindak Pidana

Tidak Ada Konflik Kepentingan antara Nadiem dan Investasi Google di Gojek

- Tidak ada kaitan antara investasi Google di Gojek, baik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB)/PT Gojek Indonesia (PT GI)/PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dengan pemilihan Chrome OS di Kemendikbudristek.
- Sehari sebelum dilantik, Nadiem dengan sukarela melepaskan jabatannya sebagai Komisaris Utama di PT AKAB dan Direktur Utama di PT Gojek Indonesia serta menguasakan *super voting rights** dan *regular voting rights*** di PT AKAB.
- **Hampir 70% investasi Google di PT AKAB/GoTo terjadi di 2018, hampir 1,5 tahun sebelum Nadiem menjabat sebagai Menteri.**
- Google berinvestasi di PT AKAB jauh sebelum Nadiem menjadi Menteri, yaitu di April 2018.
- Google berinvestasi kembali pada tahun 2020 (7,04%) dan 2021 (4,72%) hanya merupakan langkah Google untuk menghindari dilusi*** karena penurunan nilai saham akibat penambahan modal dari investor besar. Tidak ada hubungannya dengan pemilihan Chrome OS atau Chromebook di Kemendikbudristek.
- **Transfer dana Rp809.596.125.000,- dari PT AKAB ke PT GI pada tahun 2021 murni transaksi korporasi internal GoTo.**
 - PT AKAB melakukan investasi tersebut melalui penerbitan saham baru, bukan pembelian saham dari pemegang saham.
 - Mayoritas saham (99%) dikuasai PT AKAB, sedangkan kepemilikan pemegang saham lain, termasuk Nadiem, terdilusi hingga di bawah 1%.
 - Dana sebesar Rp809 miliar tersebut langsung secara utuh dikembalikan oleh PT GI kepada PT AKAB untuk tujuan pelunasan utang.
 - Transaksi ini adalah langkah administratif PT AKAB dalam menjalankan corporate governance sebelum pelaksanaan Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO) di tahun 2021.
 - Berdasarkan dokumentasi korporasi, Nadiem tidak menerima sepeserpun dari transaksi ini.
 - Tidak ada pemilik saham perorangan yang diuntungkan, termasuk Nadiem.
 - **Transaksi ini tidak ada hubungan sama sekali dengan Google, Chromebook, Chrome OS, maupun Kemendikbudristek.**
- Dari 2017 hingga 2022, Nadiem tidak pernah menjual sahamnya di PT AKAB.
- Selain Google, banyak investor besar lainnya yang juga berinvestasi di PT AKAB, seperti Sequoia, Tencent, Temasek, BlackRock, dan JD, yang menunjukkan bahwa investasi Google murni karena kinerja dan potensi Gojek sebagai perusahaan.

*Super Voting Rights: Hak suara lebih besar bagi pemegang saham tertentu untuk memengaruhi keputusan perusahaan

**Regular Voting Rights: Hak suara standar yang dimiliki pemegang saham dalam suatu perusahaan

***Dilusi: Berkurangnya persentase kepemilikan dan/atau nilai ekonomi saham investor yang sudah ada akibat penerbitan saham baru

Dua Kali Audit BPKP: Tidak Ada Mark-up Harga

- Hasil audit BPKP 2020 & 2021-2022 menunjukkan tidak ada mark-up harga di proses pengadaan Chrome OS Kemendikbudristek.
- **Walau tidak diharuskan, seluruh proses pengadaan Chrome OS Kemendikbudristek melibatkan JAMDATUN* (Kejaksaan Agung), LKPP**, BPKP***, dan KPPU**** atas permintaan Nadiem.**
 - Tujuannya memastikan agar proses patuh regulasi, akurat, akuntabel, dan menghindari potensi konflik kepentingan.

*JAMDATUN: Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

**LKPP: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP bertanggung jawab kepada Presiden)

***BPKP: Badan Pemeriksa Keuangan & Pembangunan

****KPPU: Komisi Pengawas Persaingan Usaha

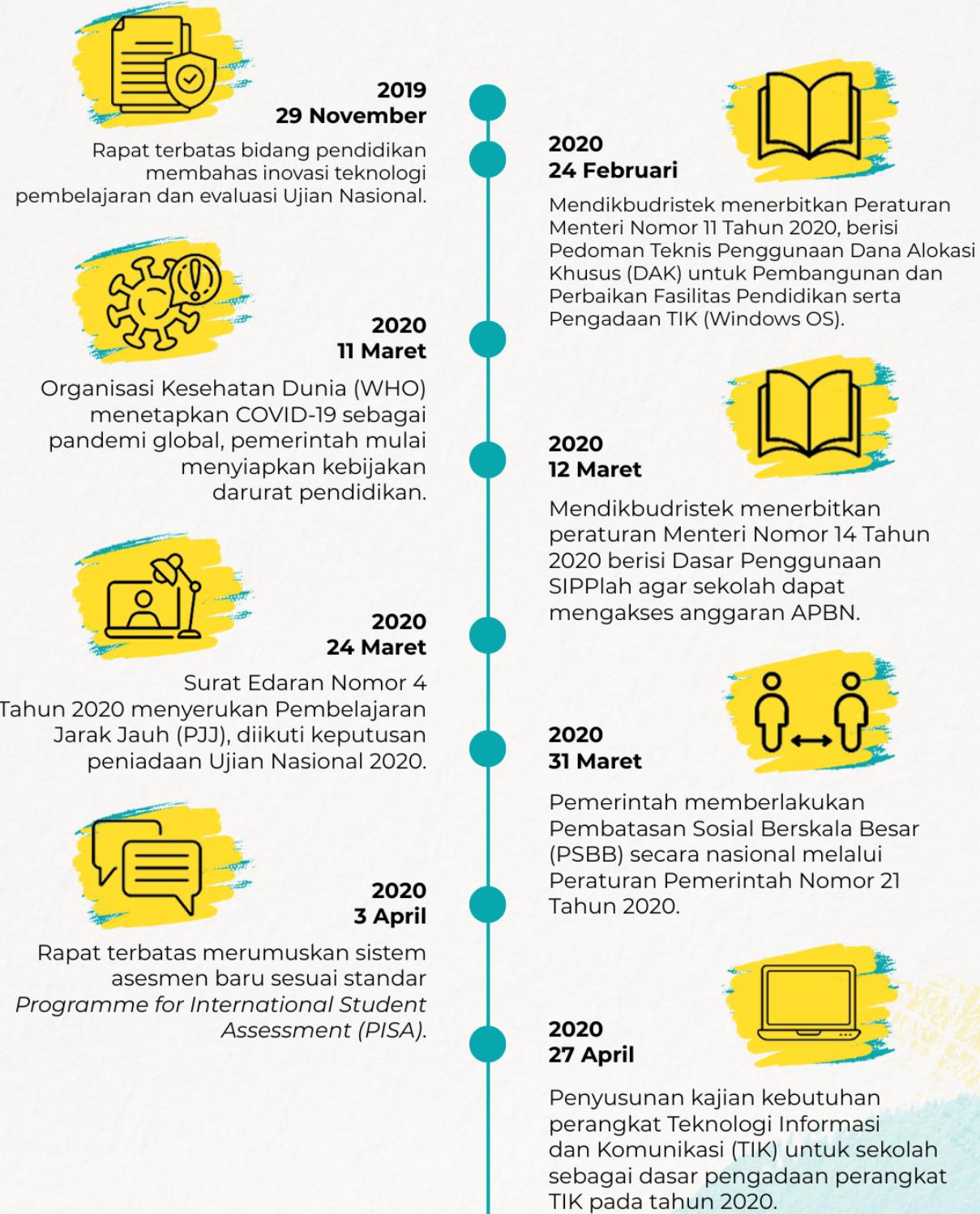


Linimasa Kebijakan Pemilihan Chrome OS 2019–2025



Program pengadaan Chrome OS untuk sekolah dasar dan menengah oleh Kemendikbudristek yang digagas Nadiem Makarim saat pandemi COVID-19, kini menjadi objek pemeriksaan hukum meski dirancang untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan masih berjalan hingga 2025. Kronologi berikut memaparkan tahapan program tersebut dari awal hingga pelaksanaannya.

Kronologi Pengadaan Perangkat TIK Pendidikan (2019–2025)





2020
6 Mei

Rapat pertama membahas kelebihan dan kekurangan Chrome OS dibanding Windows OS (dihadiri Nadiem). Rapat kedua memutuskan penggunaan Chrome OS (tanpa kehadiran Nadiem).



2020
4 Juni

Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020 dibahas dalam rapat terbatas.



2020
17 Juni

Diterbitkan Dokumen Reviu Kajian Teknis Analisa Kebutuhan Alat Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2020 sebagai turunan dari Rencana Strategis Kemendikbudristek tahun 2020-2024.



2020
Juni-September

Peraturan Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Nomor 8040/C/HK/2020 diterbitkan sebagai payung hukum pelaksanaan pengadaan perangkat TIK di sekolah dasar dan menengah.



2021
11 Februari

Mendikbudristek menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2021 berisi Pedoman Teknis Penggunaan DAK untuk Pembangunan dan Perbaikan Fasilitas Pendidikan serta Pengadaan TIK (Chrome)



2020
3 Juni

Mendikbudristek menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Kebudayaan tahun 2020-2024 yang salah satunya berisi Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020.



2020
8 Juni

Dirjen Kemendikbudristek menerbitkan SK Dirjen No. 5190/C.C1/KP/2020 tentang Penetapan Tim Teknis Reviu Hasil Kajian Teknis Analisa Kebutuhan Alat Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2020.



2020
3 Agustus

Rapat Terbatas tentang Transformasi Digital menargetkan 100.000 sumber daya manusia (SDM) digital per tahun melalui anggaran Kemendikbud RI.



2020
30 September

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) pengadaan perangkat TIK disahkan, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diarahkan untuk Chrome OS.



2023
21 Juni

Pemerintah mengumumkan berakhirnya status pandemi COVID-19.



2025

Program pengadaan perangkat TIK berbasis Chrome OS untuk sekolah dasar dan menengah masih berlangsung.

Data Menunjukkan Pengadaan Chromebook Tak Berhubungan dengan Investasi Google di PT AKAB

Rangkaian investasi Google ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) terjadi sebelum dan sesudah Nadiem menjabat sebagai Mendikbudristek. Investasi dari Google (dan para investor lainnya) di PT AKAB tidak ada hubungannya dengan pengadaan Chromebook atau Chrome OS yang dilakukan Kemendikbudristek.

2010

PT Gojek Indonesia berdiri. Nadiem memegang 99% saham, sementara 1% sisanya dimiliki Atika Makarim.

2014

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) berdiri untuk kebutuhan Penanaman Modal Asing (PMA) yang menaungi bisnis pengembangan teknologi superapp dengan dukungan investor domestik dan investor internasional. Sementara PT Gojek Indonesia tetap berdiri sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menaungi dan mengembangkan bisnis kemitraan dengan para mitra pengemudi.

2015

Modal dasar awal PT AKAB mencapai lebih dari Rp10 miliar, dengan modal disetor lebih dari Rp2,5 miliar. Nadiem memegang 20,5% dari seluruh modal disetor.

2016

PT AKAB mengantongi pendanaan Series D dengan dukungan lebih banyak investor institusional besar. Modal disetor tumbuh menjadi lebih dari Rp400 miliar.

2018

Google mulai berinvestasi dengan kepemilikan saham di PT AKAB sebesar 3,73%.

2019

PT AKAB memasuki tahap pendanaan Series F dengan dukungan dari Google, Hera Capital, Tencent, dan Yosemite Strategies, L.L.C. Modal disetor mencapai lebih dari Rp600 miliar. Nadiem hanya memiliki saham sebesar 3,46% di PT AKAB dan bukan merupakan pemegang saham pengendali.

22 Oktober 2019

Nadiem menguasakan voting rights kepada pemegang saham lain di PT AKAB.

23 Oktober 2019

Nadiem resmi dilantik dan menjabat sebagai Mendikbudristek.

2020

PT AKAB memasuki tahap pendanaan Series F dengan penambahan investasi dari Google, JD, dan Tencent. Telkomsel menanamkan modal senilai USD150 juta.

2021

PT AKAB memasuki putaran pendanaan Series F (Pre-IPO) dengan penambahan investasi dari Google, Abu Dhabi Investment Authority, Temasek, Tencent, dan Telkomsel.

2021

Pada Mei 2021, PT AKAB merger dengan Tokopedia dan membentuk PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo).

2022

GoTo melakukan Initial Public Offering (IPO) dengan 3,43% saham ditawarkan ke publik seharga Rp338/saham, sehingga nilai totalnya mencapai lebih dari Rp13,7 triliun.





Terkait Grup WhatsApp “Mas Menteri Core Team”

Apa benar ada Grup WhatsApp (WAG) “Mas Menteri Core Team” yang dibentuk oleh Jurist Tan dan sudah membahas Chrome OS sebelum Nadiem dilantik?

WAG “Mas Menteri Core Team” dibentuk setelah Nadiem dilantik. WAG tersebut dibentuk untuk berkomunikasi dengan stafsus dan staf ahli pendidikan untuk membahas rencana program pendidikan yang digagas oleh Nadiem. WAG tersebut sama sekali tidak membahas mengenai Chrome OS maupun Chromebook.

Pembahasan mengenai pemilihan sistem operasi baru ada di WAG tersebut 6 bulan setelah Nadiem resmi menjabat (5 Mei 2020). Tidak pernah ada perintah, arahan, atau keputusan untuk memilih Chrome OS atau Chromebook.

Benarkah Nadiem, SW selaku Direktur SD, dan MUL selaku Direktur SMP membuat Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan yang spesifikasinya sudah mengunci Chrome OS? Sehingga selanjutnya Tim Teknis membuat kajian tinjauan teknis agar merujuk pada Chrome OS.

Nadiem tidak pernah memberikan perintah untuk menggunakan Chrome OS atau Chromebook. Ia juga sempat berdiskusi dengan Ibrahim Arief (Ibam) karena ingin memberi fleksibilitas jenis sistem operasi agar semua sekolah bisa mendapat laptop, meski tidak menggunakan Chrome OS.

Nadiem tidak pernah membuat Petunjuk Teknis (Juknis), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), maupun mengunci spesifikasi Chrome OS. Keputusan penggunaan Chrome OS yang dimuat di kajian teknis sepenuhnya menjadi kewenangan Tim Teknis.

Terkait Kerugian Negara

Kejaksaan Agung menyebutkan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chrome OS di Kemendikbudristek mencapai lebih dari Rp2,1 triliun. Angka ini lebih tinggi dari perhitungan sebelumnya sebesar Rp1,9 triliun yang disampaikan Kejagung pada Juli 2025. Apa tanggapan Anda?

Tidak ada kerugian negara. Pemilihan Chrome OS justru menghemat anggaran Rp1,2 triliun. Kalau pakai Windows OS, negara harus membayar lisensi ±Rp1,2 triliun (USD50×1,6 juta laptop), belum termasuk langganan manajemen perangkat (*device management*) per tahun. Sementara Chrome OS gratis dan tidak memerlukan biaya lisensi tambahan.

Sebelum Nadiem menjadi Menteri, sistem operasi yang dipilih oleh Kemendikbudristek selalu Windows: tanpa kajian dan menggunakan lisensi berbayar. Ketika Kemendikbudristek beralih menggunakan Chrome OS yang gratis, mulai muncul resistensi serta tuduhan praktik korupsi walaupun proses sejak awal didampingi oleh Jamdatun* (Kejaksaan Agung), BPKP**, LKPP*** serta KPPU****.

Kalaupun ada tuduhan kerugian negara yang berhubungan dengan *mark-up* harga laptop, kerugian tersebut tidak ada hubungannya dengan kebijakan seleksi Chrome OS. Harga perangkat di e-catalog ditentukan oleh vendor dengan persetujuan LKPP, dimana setiap perangkat wajib memenuhi regulasi 25% TKDN****. Karenanya, tuduhan kerugian negara terkait *mark-up* harga laptop tidak ada hubungannya dengan kebijakan seleksi Chrome OS.

Nadiem hanya terlibat dalam pemilihan sistem operasi dan tidak terlibat sama sekali dalam pemilihan laptop.

Tidak ada penunjukan langsung vendor dan Google tidak berpartisipasi dalam proses pengadaan, karena Google bukan vendor laptop.

Selain itu, hasil audit BPKP 2020 & 2021-2022 menunjukkan tidak ada *mark-up* harga di proses pemilihan dan pengadaan Chrome OS Kemendikbudristek.

*JAMDATUN: Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

**BPKP: Badan Pemeriksa Keuangan & Pembangunan

***LKPP: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP bertanggung jawab kepada Presiden)

****KPPU: Komisi Pengawas Persaingan Usaha

*****TKDN: Tingkat Komponen Dalam Negeri

Dalam perhitungan terbaru, Kejaksaan Agung menyebut kerugian berasal dari dua komponen (harga laptop menggunakan Chrome OS yang lebih mahal sebesar Rp1,56 triliun dan pengadaan *Chrome Device Management/CDM* sebesar Rp621,3 miliar) yang dinilai tidak diperlukan serta tidak bermanfaat. Temuan ini membuat nilai kerugian negara membengkak sekitar Rp200 miliar dibanding hitungan awal.

Penetapan harga laptop berbasis Chrome OS bukan kewenangan Nadiem, melainkan ditentukan oleh PPK* dan LKPP**, sebagaimana tertuang dalam pasal 11 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Presiden 16/2018. Peran Nadiem hanya memberi pendapat pada rapat tanggal 6 Mei 2020, yang mana Nadiem hanya mempersilakan tim untuk melanjutkan kajian guna mengonfirmasi rekomendasi tersebut.

Pernyataan bahwa *Chrome Device Management* (CDM) tidak bermanfaat Adalah tidak benar. Justru CDM pada laptop berbasis Chrome OS memberikan manfaat nyata dalam pengawasan penggunaan laptop:

- Penggunaan laptop berbasis Chrome OS dapat **dibatasi hanya untuk keperluan pembelajaran**.
- Pemblokiran **situs judi online, aplikasi gim, dan konten pornografi** secara terpusat.
- Keamanan data dan perlindungan terhadap *malware/ransomware* yang lebih ketat dengan proteksi bawaan seperti enkripsi, *sandboxing*, *update otomatis*, *verified boot*.
- Sinkronisasi Chrome: cukup *login* dengan satu akun, pengguna bisa langsung mengakses data, aplikasi, dan pengaturan yang sama di perangkat mana pun.
- Fungsi Registrasi dan identifikasi, untuk memantau jumlah Chromebook/Laptop yang telah aktif dan digunakan.

Karena CDM, untuk pertama kalinya dalam sejarah pengadaan TIK* di sekolah-sekolah Indonesia, laptop dapat dipantau secara transparan dan akuntabel, termasuk untuk penggunaan laptop dan aplikasi yang digunakan. Semua data tersedia secara langsung (*real-time*).**

*PPK: Pejabat Pembuat Komitmen

**LKPP: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP bertanggung jawab kepada Presiden)

***TIK: Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kejaksaan Agung menyebutkan ada dugaan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi secara melawan hukum, termasuk adanya penerimaan uang oleh pejabat negara dalam perkara pengadaan laptop berbasis Chrome OS ini. Apakah ini benar?

Tidak ada bukti bahwa Nadiem menerima keuntungan pribadi atau memperkaya pihak lain. Kewenangan Nadiem berada pada ranah penetapan kebijakan umum di tingkat Kementerian. Dalam kerangka kebijakan tersebut, peran Nadiem sebatas mempersilakan tim untuk melanjutkan kajian guna mengonfirmasi rekomendasi tersebut. Proses pengadaan sepenuhnya ditangani LKPP* di bawah koordinasi Dirjen PAUD Dikdasmen**. LKPP bertanggung jawab kepada Presiden.

*LKPP: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**PAUD Dikdasmen: Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Terkait Kajian Teknis dan Pengadaan Chromebook

Apa urgensi pengadaan laptop berbasis Chrome OS?

Laptop berbasis Chrome OS pada awalnya dicanangkan sebagai bagian dari penguatan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan transformasi digital pendidikan. Namun, pandemi COVID-19 menuntut peralihan cepat ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sesuai arahan Presiden saat itu. Dalam situasi tersebut, hasil kajian berlapis tim Kemendikbudristek merekomendasikan laptop berbasis Chrome OS sebagai pilihan paling sesuai untuk kebutuhan AKM dan Program Belajar Mengajar, termasuk PJJ, karena lebih murah, kontrol terpusat, dan terintegrasi dengan android yang banyak digunakan oleh kalangan guru di sekolah.

Kenapa harga di e-Katalog untuk laptop berbasis Chrome OS lebih mahal daripada di marketplace?

Harga lebih tinggi akibat regulasi TKDN*. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, baik tingkat Presiden hingga Kementerian, termasuk Kemendikbudristek, harus mematuhi persyaratan TKDN minimum 25% untuk pengadaan barang/jasa pemerintah.

Banyak produsen yang tidak dapat memenuhi syarat tersebut, akibatnya pasokan

terbatas, harga jadi lebih tinggi, berbeda dengan harga di *marketplace* yang lebih bebas dan kompetitif. Selisih harga ini merupakan bagian dari kebijakan keberpihakan pada industri nasional.

Selain itu, perbedaan harga juga disebabkan elemen lain yang tidak ada dalam harga ritel:

- Biaya Distribusi: Pengiriman ribuan unit ke daerah pelosok, termasuk wilayah kepulauan, yang memerlukan biaya logistik tinggi.
- Garansi & Purna Jual: Pengadaan pemerintah sering mensyaratkan *on-site service* atau garansi panjang (misalnya 3 tahun), yang biayanya jauh lebih tinggi dibandingkan garansi standar toko.
- Lisensi Software: Termasuk lisensi *Chrome Education Upgrade* (CEU) dan perangkat lunak pendukung lain yang sifatnya berbayar.

*TKDN: Tingkat Komponen Dalam Negeri

Seharusnya dilakukan perbandingan antara penyedia sistem operasi (OS) untuk menentukan pilihan yang paling optimal dari segi kualitas dan biaya.

Kajian, termasuk perbandingan, sistem operasi (OS) dari berbagai penyedia telah dilakukan oleh tim internal bersama pejabat Dirjen PAUD Dikdasmen*.

Hasil kajian merekomendasikan Chrome OS sebagai pilihan paling paling sesuai untuk kebutuhan PJJ* dan AKM** karena lebih murah, lebih aman dan bisa dikelola langsung oleh Kemendikbudristek.

Di tahun-tahun sebelum Nadiem menjadi menteri, Windows selalu ditetapkan sebagai sistem operasi tunggal tanpa kajian dan menggunakan lisensi berbayar, meskipun terdapat opsi sistem operasi gratis yang tidak pernah dipertimbangkan.

*PAUD Dikdasmen: Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

**PJJ: Pendidikan Jarak Jauh

***AKM: Asesmen Kompetensi Minimum

Pada bagian perbandingan OS pada Kajian Analisis pada 27 April 2020 dinyatakan bahwa penggunaan Chrome OS dinilai kurang efektif. Namun, pada Mei 2020 pembahasan kembali dilanjutkan dan dalam waktu singkat diputuskan untuk melaksanakan pembelian Chrome OS. Mengapa demikian?

Kajian Analisis tertanggal 27 April 2020 merupakan kajian awal yang masih bersifat *draft* belum konklusif maupun final.

Kajian tersebut disusun sebagai bahan awal terhadap berbagai isu yang relevan salah satunya mengangkat isu utama mengenai Chrome OS tidak dapat digunakan di daerah 3T* yang minim koneksi internet.

Dalam kajian 27 April 2020, pembahasan tidak difokuskan pada satu jenis perangkat atau sistem operasi tertentu, melainkan memuat kajian komparatif dengan mempertimbangkan berbagai alternatif penyedia sistem operasi, antara lain Windows, Linux, dan Apple. sebagai bagian dari proses penjajakan awal sebelum

kajian lanjutan. Sedangkan pada kajian tahap lanjutan, tim merekomendasikan laptop berbasis Chrome OS sebagai pilihan paling sesuai untuk kebutuhan PJJ** dan AKM*** karena lebih murah, lebih aman, dan bisa dikelola langsung oleh Kemendikbudristek. Mayoritas isu yang diangkat pada kajian sebelumnya menjadi tidak relevan.

Proses pemilihan sistem operasi dilakukan secara bertahap dan berbasis kajian yang dilakukan oleh tim pelaksana bersama Direktur Jenderal (Dirjen) PAUD Dikdasmen****, konsultan, dan tenaga ahli.

*3T: Tertinggal, Terdepan, Terluar

**PJJ: Pendidikan Jarak Jauh

***AKM: Asesmen Kompetensi Minimum

****PAUD Dikdasmen: Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Chrome OS tidak cocok untuk daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T), kenapa tetap dipilih?

Program pengadaan laptop berbasis Chrome OS yang diadakan pada masa jabatan Nadiem hanya ditujukan untuk sekolah yang memiliki listrik dan internet sesuai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang dikeluarkan pada September 2020.

Laptop berbasis Chrome OS di wilayah 3T* muncul karena kesalahan pengisian data oleh sekolah. Ketika ada sekolah yang terbukti tidak memenuhi persyaratan sesuai Juklak, laptop langsung ditarik untuk didistribusikan kembali ke sekolah di wilayah tujuan utama.

*3T: Tertinggal, Terdepan, Terluar

Apa benar Nadiem meminta rapat tertutup melalui Zoom pada 6 Mei 2020?

Nadiem tidak menginisiasi Rapat Zoom Meeting tersebut. Sehari sebelum rapat tersebut dilakukan (pada 5 Mei 2020), Fiona menghubungi Nadiem untuk menginformasikan agenda rapat tanggal 6 Mei 2020. Hal ini menunjukkan bahwa rapat tanggal 6 Mei 2020 diadakan bukan atas arahan Nadiem.

Pada saat rapat, Nadiem meminta tim untuk memberikan penjelasan lengkap terkait pertemuan yang sebelumnya diinformasikan oleh Fiona. Permintaan tersebut menunjukkan bahwa Nadiem belum memiliki konteks maupun pemahaman memadai mengenai perbandingan menyeluruh antara laptop berbasis Chrome OS (Chromebook) dengan laptop/PC berbasis Windows OS.

Rapat ini berfokus pada laporan perkembangan terkait pengadaan TIK untuk Asesmen dan Pembelajaran serta pemilihan jenjang pendidikan dan sekolah yang akan terlibat dalam uji coba atau implementasi program digitalisasi pendidikan. Belum ada keputusan final mengenai penggunaan laptop berbasis Chrome OS atau *Chrome Device Management (CDM)*.

Pernyataan Nadiem berupa “*Go ahead with Chromebook*” dalam rapat tersebut merupakan arahan untuk melanjutkan kajian teknis yang lebih mendalam dan untuk melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses pengujian lebih lanjut, bukan keputusan final untuk menggunakan Chromebook.

Nadiem meminta tim melibatkan Jamdatun* dan LKPP** untuk terlibat dalam seluruh proses guna memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memberikan masukan teknis dan masukan legal.

*JAMDATUN: Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

**LKPP: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP bertanggung jawab kepada Presiden)

Kenapa rapat dengan Google Indonesia untuk program *Google for Education* pada Februari 2020 ditindaklanjuti dengan rapat tertutup pada 6 Mei 2020? Apakah benar ada yang melarang peserta merekam rapat?

Rapat 6 Mei dilakukan secara daring dan bukan rapat yang sengaja dilakukan secara tertutup dan rahasia. Larangan merekam dan imbauan untuk menjaga rapat tetap tertutup bertujuan untuk memastikan keamanan data dan informasi.

Di tahun 2020, semua rapat internal dengan Nadiem yang menggunakan platform Zoom tidak direkam karena tingginya risiko rekaman diretas pihak eksternal. Tindakan ini dilakukan karena pada masa awal COVID-19, BSSN* belum memberikan sertifikasi keamanan terhadap aplikasi Zoom yang terpaksa digunakan untuk kebutuhan rapat.

Dalam rapat daring tersebut, Nadiem menegaskan bahwa rapat pertama tidak menghasilkan keputusan terkait sistem operasi (OS). Rapat itu hanya menyampaikan rencana pengadaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), tanpa ada pemaparan kajian apa pun. Satu-satunya materi yang ditampilkan adalah Presentasi atau PPT berjudul Pengadaan TIK untuk Asesmen dan Pembelajaran.

*BSSN: Badan Siber dan Sandi Negara

Apa benar pengadaan Chrome OS tidak transparan dan tanpa tindak lanjut yang jelas?

Tidak benar. Atas permintaan Nadiem, proses pemilihan sistem operasi (OS) didampingi, dikawal, dan diaudit lembaga Pemerintah dari awal, agar sesuai dengan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ([AUPB](#)):

- Sejak awal, JAMDATUN* (Kejaksaan Agung), LKPP**, BPKP***, dan KPPU**** selalu dilibatkan.
- Hasil dua kali audit BPKP (2020 & 2021-2022) menyatakan tidak ada *mark-up* harga dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga.
- KPPU mengawasi pengadaan laptop berbasis Chrome OS oleh LKPP untuk

memastikan proses pengadaan kompetitif, adil, dan bebas dari praktik monopoli atau konflik kepentingan.

*JAMDATUN: Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

**LKPP: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP bertanggung jawab kepada Presiden)

***BPKP: Badan Pemeriksa Keuangan & Pembangunan

****KPPU: Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pada 6 Mei 2020, diadakan rapat di mana Nadiem memutuskan penggunaan Chrome OS, yang berarti keputusan tersebut merupakan instruksi langsung dari Menteri?

Tidak benar. Terdapat dua sesi rapat pada 6 Mei 2020 yang merupakan bagian dari rangkaian pembahasan lanjutan:

Rapat Sesi 1 | Nadiem hadir:

- Tim Kemendikbudristek mempresentasikan detail masing-masing sistem operasi (OS) kepada Nadiem selaku Menteri, dan merekomendasikan bahwa secara ekonomis dan teknis Chrome OS lebih unggul dibandingkan Windows OS.
- Rekomendasi tim adalah untuk menggunakan 14 laptop berbasis Chrome OS dan 1 laptop berbasis Windows OS.
- Nadiem hanya mengikuti rekomendasi berdasarkan hasil kajian tim.

Rapat Sesi 2 | Nadiem tidak hadir:

- Keputusan menggunakan laptop berbasis Chrome OS diambil secara kolektif oleh tim pelaksana yang dipimpin oleh Dirjen PAUD Dikdasmen*.
- Tim yang menghadiri rapat ini termasuk pejabat jajaran eselon satu dan dua, staf khusus Menteri, dan konsultan IT Kemendikbudristek.

*PAUD Dikdasmen: Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Benarkah kesaksian Hamid Muhammad, Mantan Dirjen PAUD Dikdasmen, yang menyatakan bahwa Nadiem instruksikan ‘Go Ahead’ untuk pengadaan Chromebook?

Kata “go ahead” dimaksudkan sebagai persetujuan agar kajian dilanjutkan sesuai pertimbangan dan rekomendasi Tim Kajian yang bertugas menyusun analisis pilihan sistem operasi (OS) dalam pengadaan TIK untuk mendukung peningkatan proses belajar mengajar dan AKM. Pernyataan tersebut bukan perintah dan bukan keputusan untuk memilih Chrome OS, mengingat secara teknis Tim Kajianlah yang memiliki kompetensi untuk menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing OS.

Hal ini tercermin dalam rekomendasi Tim Kajian tertanggal 6 Mei, yang mengusulkan skema hybrid antara Chrome OS dan Windows, dengan komposisi 14 laptop Chrome OS dan 1 laptop Windows untuk setiap sekolah. Rekomendasi inilah yang dipaparkan kepada Nadiem ketika pernyataan “go ahead” disampaikan. Perubahan komposisi (dihilangkannya laptop Windows) terjadi setelah pertemuan tersebut dan tanpa persetujuan Nadiem, mengingat rapat tersebut bukan merupakan forum pengambilan keputusan final.

Apakah benar nama Ibrahim Arief (Ibam) dicantut dalam SK kajian akhir?

Nama beliau tercantum dalam lembar pengesahan penelaahan (review) hasil kajian tim teknis. Pencantuman nama beliau merupakan bagian dari kapasitasnya sebagai tim eksternal (konsultan) Kemendikbudristek yang memberikan masukan profesional berdasarkan kajian independen. Namun, Ibam tidak menandatangani dokumen tersebut.

Benarkah sejak awal Nadiem menginginkan penggunaan Chrome OS sehingga spesifikasi dikunci?

Tidak benar. Seluruh proses pemilihan Chrome OS telah melalui kajian dan evaluasi yang melibatkan tim internal, serta pendampingan oleh JAMDATUN*, BPKP**, dan KPPU***. Rekomendasi penggunaan Chrome OS muncul dari hasil kajian seluruh tim, bukan dari Nadiem.

Dalam setiap diskusi, rapat, dan korespondensi (termasuk di WAG Mas Menteri Core Team), Nadiem secara konsisten meminta klarifikasi dan mendorong tim untuk objektif dalam melakukan pemilihan sistem operasi (OS), termasuk Windows OS dan Chrome OS, untuk memastikan bahwa sistem operasi yang dipilih adalah yang terbaik dan paling sesuai kebutuhan. Hal ini juga didukung oleh banyaknya bukti tertulis, termasuk saat Nadiem mengarahkan penggunaan laptop berbasis Windows OS ketika ada isu keterbatasan pasokan (*supply*) laptop berbasis Chrome OS.

*JAMDATUN: Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

**BPKP: Badan Pemeriksa Keuangan & Pembangunan

***KPPU: Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Apakah benar Nadiem menerbitkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021, yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS?

Benar dan hal tersebut bukan perbuatan melawan hukum. Spesifikasi Chrome OS yang dicantumkan pada lampiran X Permendikbud 5/2021 telah melalui proses kajian yang membandingkan Chrome OS dengan sistem operasi (OS) lainnya yaitu Windows.

Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 dibuat hampir 7 bulan setelah tim teknis memutuskan untuk menggunakan Chrome OS. Saat Permendikbud ini dikeluarkan, pengadaan di tahun 2020 telah selesai. Nadiem tidak menandatangani peraturan apapun dalam penentuan spesifikasi sistem operasi yang dilakukan di tahun 2020.

Di tahun 2021, Permendikbud harus melampirkan hasil keputusan Direktorat terkait sebagai acuan agar pedoman penggunaan DAK* patuh pada regulasi Dirjen/Direktorat.

Setiap tahunnya, selalu ada satu sistem operasi (OS) yang ditentukan sebagai bagian dari spesifikasi perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang akan digunakan untuk pengadaan. Hal ini juga dilakukan di tahun sebelumnya saat Nadiem belum ditunjuk sebagai Mendikbudristek.

*DAK: Dana Alokasi Khusus

Apa alasan utama Nadiem menunjuk Jurist Tan dan Fiona sebagai Staf Khusus?

Penunjukkan Jurist Tan dan Fiona sebagai Staf Khusus bertujuan untuk memberikan masukan dan saran profesional. Mengacu pada peraturan Presiden nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Menteri berhak mengangkat Staf Khusus maksimal 5 orang untuk memberikan saran dan pertimbangan yang strategis.

Apakah benar peran Jurist Tan sebagai berikut:

- **Memimpin rapat melalui zoom meeting dan meminta SW, MUL, Ibam untuk mengadakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kemendikbudristek dengan menggunakan Chrome OS**
- **Menindaklanjuti pertemuan dengan pihak Google yang sebelumnya dilakukan Nadiem untuk membahas pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

Tidak benar. Jurist Tan tidak berwenang dalam pengambilan keputusan dan eksekusi. Sebagai Staf Khusus, kapasitasnya hanya memberikan masukan dan saran profesional, serta rekomendasi strategis (bukan mengarahkan) terkait kebijakan, program, atau isu tertentu melalui analisis, kajian, dan koordinasi dengan unit kerja terkait maupun pemangku kepentingan eksternal.

Apakah benar setiap perkataan Jurist Tan juga secara otomatis merupakan arahan Nadiem yang berarti perintah langsung dari Menteri? Selain itu, disebutkan pula bahwa Jurist Tan memiliki peran yang sangat besar termasuk mengatur semua hal hingga bisa memutasikan pejabat.

Jurist Tan, selaku staf khusus Nadiem, menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai jabatannya. Jurist Tan bertugas memastikan arahan dan kebijakan Nadiem sebagai Mendikbudristek dilaksanakan dengan baik oleh pejabat struktural di lingkungan Kemendikbudristek.

Persepsi terkait sikap Jurist Tan berada di ranah opini personal dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas maupun kewenangan formal yang bersangkutan.

Apakah benar peran Ibrahim Arief (Ibam) sebagai berikut:

- **Merencanakan penggunaan Chrome OS bersama Nadiem dalam proyek pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**
- **Mengarahkan tim teknis mengeluarkan hasil kajian berupa Chrome OS dengan cara mendemonstrasikan melalui Zoom meeting**

Tidak benar. Ibam tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan maupun eksekusi. Sebagai Konsultan Teknologi, perannya terbatas pada memberikan masukan dan saran profesional berdasarkan analisis serta kajian independen.

Benarkah Ibam telah menolak Chrome OS untuk dipilih menjadi perangkat pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)?

Berdasarkan fakta, Ibam justru menyarankan penggunaan Chrome OS untuk Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dengan menyatakan Chrome OS sebagai pilihan yang lebih baik dalam Kajian Teknis.

Sebagai Konsultan Teknologi di Kemendikbudristek, Ibam tidak memiliki kapasitas untuk memberikan keputusan menerima atau menolak pemilihan Chrome OS untuk perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Menurut Ibam, Chromebook memiliki beberapa kekurangan yaitu:

- **Harus terhubung dengan internet**
- **Ada aplikasi Kementerian yang tidak bisa digunakan dalam Chrome OS**

Chrome OS hanya ditujukan ke wilayah dengan infrastruktur listrik dan akses internet yang memadai, sesuai Petunjuk Pelaksanaan/Juklak (September 2020) dan Petunjuk Teknis/Juknis (Februari 2021).

Ada kecurigaan Ibam jika beli laptop dalam jumlah besar harusnya jadi lebih murah?

Pengadaan perangkat TIK Kemendikbudristek tidak dilakukan dalam satu pembelian massal seperti ritel, sehingga tidak otomatis menghasilkan harga grosir yang lebih murah.

Perlu dipahami bahwa harga di e-Katalog ditetapkan oleh vendor dan disetujui LKPP* berdasarkan spesifikasi produk, material, dan berbagai komponen biaya. Faktor-faktor yang membuat harga tidak bisa disamakan dengan pembelian ritel antara lain:

- Syarat 25% TKDN**.
- Biaya Distribusi: Pengiriman ribuan unit ke sekolah di seluruh Indonesia, termasuk daerah terpencil dan kepulauan, yang menambah biaya logistik.
- Garansi & Layanan Purna Jual: Pemerintah mensyaratkan garansi panjang dan *on-site service*, yang jauh lebih mahal dibanding garansi standar toko.
- Licensi Perangkat Lunak: Termasuk lisensi *Chrome Education Upgrade* (CEU) dan software pendukung lain yang berbayar.

*LKPP: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP bertanggung jawab kepada Presiden)

**TKDN: Tingkat Komponen Dalam Negeri

Apakah benar “Stafsus” memiliki kewenangan yang berlebihan? Seperti menentukan spesifikasi pengadaan barang bernilai triliunan Rupiah yang seharusnya melibatkan proses birokrasi yang lebih ketat?

Staf Khusus tidak berwenang dalam pengambilan keputusan dan eksekusi.

Kapasitasnya hanya memberikan masukan dan saran profesional, serta rekomendasi strategis (bukan mengarahkan), terkait kebijakan, program, atau isu tertentu melalui analisis, kajian, dan koordinasi dengan unit kerja terkait maupun pemangku kepentingan eksternal.

Apa benar ada “Shadow Team” yang punya kewenangan untuk mengatur dan mengarahkan internal dan pejabat Kemendikbudristek?

Tidak benar. Tim yang dimaksud adalah GovTech Edu, vendor atau pelaksana yang membantu kegiatan digitalisasi di Kemendikbudristek dan tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Tim teknis hadir untuk mendukung keterampilan seperti *engineering, product management*, dan *data science* dalam membangun platform nasional (PMM*, ARKAS**, SIPLah***), bukan mengambil alih fungsi kebijakan. Semua keputusan administratif, pencairan anggaran, dan pertanggungjawaban hukum tetap di tangan PPK**** dan KPA****; staf ahli dan tim teknis tidak memiliki wewenang.

*PMM: Platform Merdeka Belajar

**ARKAS: Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

***SIPLah: Sistem Informasi Pengadaan Sekolah

****PPK: Pejabat Pembuat Komitmen

*****KPA: Kuasa Pengguna Anggaran

Apakah benar pengadaan Chrome OS dipaksakan (ngotot), melawan data di lapangan, dan diduga kuat ada mark-up harga yang tidak wajar?

Tidak benar. Pengadaan Chrome OS telah melalui evaluasi teknis, konsultasi, dan kajian berlapis oleh tim pelaksana yang ditunjuk, yaitu Direktur Jenderal (Dirjen) PAUD Dikdasmen*, bekerjasama dengan LKPP** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, hasil dua kali audit BPKP*** (2020 & 2021-2022) menyatakan tidak ada mark-up harga dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga.

*PAUD Dikdasmen: Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

**LKPP: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

***BPKP: Badan Pemeriksa Keuangan & Pembangunan

Pengadaan Chrome OS merupakan pemborosan anggaran. Di tengah pengabaian kesejahteraan guru, Nadiem dikritik karena memprioritaskan belanja teknologi yang mahal, sementara kewajiban konstitusional untuk kesejahteraan guru dan pendidikan dasar gratis belum terpenuhi. Bahkan disebutkan adanya upaya menghilangkan tunjangan profesi guru dalam RUU Sisdiknas?

Tidak benar. Laptop berbasis Chrome OS merupakan bagian dari kebijakan Menteri yang pada awalnya dicanangkan sebagai bagian dari penguatan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan transformasi digital pendidikan. Namun, pandemi COVID-19 menuntut peralihan cepat ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sesuai arahan Presiden saat itu. Dalam situasi tersebut, hasil kajian berlapis tim Kemendikbudristek

merekomendasikan laptop berbasis Chrome OS sebagai sistem operasional yang paling sesuai dengan kebutuhan pembelajaran saat itu.

Anggaran pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti Chrome OS berada di pos Belanja Modal, sedangkan tunjangan guru berada di pos Belanja Pegawai/Transfer Daerah. Karena berasal dari pos yang berbeda, pembelian laptop tidak memotong atau mengurangi gaji maupun tunjangan guru. Sesuai Perpres No.54/2020, tunjangan guru tetap diberikan di masa pandemi COVID-19.

Nadiem juga menghentikan pagu anggaran senilai Rp13 triliun untuk pengadaan TIK yang bertujuan untuk memastikan efisiensi anggaran. Fakta tersebut menegaskan bahwa Nadiem tidak pernah memiliki niat jahat untuk memanfaatkan anggaran TIK demi kepentingan pribadi maupun mengambil keuntungan dari pengelolaan anggaran TIK.

Di setiap penambahan anggaran di masa COVID-19, Nadiem selalu berfokus pada penanggulangan bencana dan kesejahteraan guru, yang tertuang dalam berbagai bukti tertulis.

*TIK: Teknologi Informasi dan Komunikasi

Chrome OS sudah digunakan di Malaysia pada tahun 2013 dan dihentikan pada 2019 karena dianggap tidak bermanfaat. Kenapa justru dipakai oleh Kemendikbudristek?

Di beberapa negara, Chrome OS digunakan untuk tujuan berbeda.

Sementara di Indonesia, laptop berbasis Chrome OS merupakan bagian dari kebijakan Menteri yang pada awalnya dicanangkan sebagai bagian dari penguatan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan transformasi digital pendidikan. Namun, pandemi COVID-19 menuntut peralihan cepat ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sesuai arahan Presiden saat itu. Dalam situasi tersebut, hasil kajian berlapis tim Kemendikbudristek merekomendasikan laptop berbasis Chrome OS sebagai sistem operasional yang paling sesuai dengan kebutuhan pembelajaran saat itu.

Hingga kini, Chrome OS digunakan secara global di sekolah-sekolah di Amerika Serikat, Eropa, Inggris, Australia, hingga Jepang.

Pengadaan Chrome OS ini dinilai sebagai eksperimen gagal yang meniru Malaysia?

Pengadaan Chrome OS oleh Kemendikbudristek bukan eksperimen. Hingga kini, Chrome OS digunakan secara global di sekolah-sekolah di Amerika Serikat, Eropa, Inggris, Australia, hingga Jepang.

Pengadaan Chrome OS telah melalui evaluasi teknis, konsultasi, dan kajian berlapis oleh tim pelaksana yang ditunjuk, yaitu Direktur Jenderal (Dirjen) PAUD Dikdasmen*, bekerjasama dengan LKPP** sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

*PAUD Dikdasmen: Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

**LKPP: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Data di lapangan menunjukkan banyak laptop rusak dan tidak bisa digunakan maksimal dan sebagian sekolah tidak memiliki infrastruktur untuk menjalani Chrome OS yang harus pakai internet. Bagaimana tanggapan Anda?

Pernyataan testimonial tanpa bukti faktual dari sumber yang kredibel dianggap tidak valid. Chrome OS hanya ditujukan ke wilayah dengan infrastruktur listrik dan akses internet yang memadai, sesuai Petunjuk Pelaksanaan/Juklak (September 2020) dan Petunjuk Teknis/Juknis (Februari 2021).

Unit laptop berbasis Chrome OS di wilayah 3T* muncul karena kesalahan pengisian data oleh sekolah. Ketika ada sekolah yang terbukti tidak memenuhi persyaratan sesuai Juklak, laptop langsung ditarik untuk didistribusikan kembali ke sekolah di wilayah tujuan utama.

90% laptop berbasis Chrome OS masih disalurkan hingga saat ini dan masih digunakan secara aktif oleh guru-guru di seluruh Indonesia. Hasil audit BPKP** juga menunjukkan bahwa 86% murid menggunakan laptop berbasis Chrome OS untuk AKM*** dan 89% guru fasih menggunakan laptop berbasis Chrome OS.

Chrome Device Management (CDM) juga mempermudah pemantauan penggunaan laptop secara transparan dan akuntabel karena semua data tersedia secara langsung (*real-time*). Sehingga tidak dibutuhkan testimoni atau pengambilan data secara manual (*sampling*).

*3T: Tertinggal, Terdepan, Terluar

Terkait ChromeOS dan Chromebook

Apa perbedaan ChromeOS dan Chromebook?

Chromebook bukan merek laptop, tapi laptop merek apapun yang sistemnya pakai Chrome OS.

- Chrome OS adalah sistem operasi (OS) buatan Google, sama halnya seperti Windows OS buatan Microsoft atau macOS buatan Apple.
- Banyak produsen membuat Chromebook, seperti Acer, ASUS, Lenovo, HP, Dell, dan Samsung.

Terkait Penggunaan Chromebook & Windows di Kemendikbud

Mengapa pengadaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era Nadiem berubah menjadi Chrome OS, lebih cenderung memilih Chrome OS ketimbang Windows OS?

Kerja sama dengan Google bukan merupakan kebijakan baru yang dimulai pada masa kepemimpinannya.

Pemilihan Chrome OS memang baru diimplementasikan secara luas pada masa Nadiem. Chrome OS pada awalnya dicanangkan sebagai bagian dari penguatan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan transformasi digital pendidikan. Namun, pandemi COVID-19 menuntut peralihan cepat ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sesuai arahan Presiden saat itu. Dalam situasi tersebut, hasil kajian berlapis tim Kemendikbudristek merekomendasikan Chrome OS sebagai sistem operasional yang paling sesuai dengan kebutuhan pembelajaran saat itu.

Sebaliknya, keputusan penggunaan Windows OS oleh Menteri sebelumnya tidak pernah ada kajian teknis serupa sebagaimana yang dilakukan pada saat Nadiem menjabat sebagai Mendikbudristek.

Google pernah mengirimkan surat kepada Muhamad Effendy (Mendikbud sebelum Nadiem) untuk berpartisipasi dalam pengadaan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), namun diabaikan karena dianggap gagal. Kenapa di era Nadiem diterima?

Pengadaan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada masa kepemimpinan Muhamad Effendy memiliki tujuan dan konteks yang berbeda dengan era Nadiem, yakni fokus pada jangkauan seluruh wilayah, termasuk daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T). Chrome OS dinilai tidak sesuai dan tidak dipilih.

Di era Nadiem, konteksnya berbeda karena laptop berbasis Chrome OS ditujukan untuk sekolah yang memiliki listrik dan internet, yang mana pada awalnya dicanangkan sebagai bagian dari penguatan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan transformasi digital pendidikan. Namun, pandemi COVID-19 menuntut peralihan cepat ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sesuai arahan Presiden saat itu. Dalam situasi tersebut, hasil kajian berlapis tim Kemendikbudristek merekomendasikan Chrome OS sebagai sistem operasional yang paling sesuai dengan kebutuhan pembelajaran saat itu.

Nadiem menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbudristek, padahal sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh Menteri sebelumnya karena uji coba Chrome OS tahun 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai untuk daerah 3T.

Pengadaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di masa kepemimpinannya ditujukan untuk wilayah dengan infrastruktur listrik dan

akses internet yang memadai, sesuai Petunjuk Pelaksanaan/Juklak (September 2020) dan Petunjuk Teknis/Juknis (Februari 2021).

Hal ini disebabkan karena pandemi COVID-19 menuntut peralihan cepat ke Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) sesuai arahan Presiden saat itu, dengan pelaksanaan yang bergantung pada ekosistem digital.

Adapun surat balasan yang diberikan oleh Kemedikbudristek kepada Google ditandatangani oleh Sekjen Ainun Naim.

Terkait Pencopotan Direktur SD dan Direktur SMP

Apa benar Nadiem melakukan pencopotan Direktur SD dan Direktur SMP karena menyatakan tidak setuju untuk penggunaan Chromebook atau Chrome OS?

Tidak ada pencopotan Direktur SD dan Direktur SMP. Pada Maret 2020, terdapat seleksi terbuka untuk 13 posisi yang telah direncanakan secara bersamaan. Seleksi ini dilakukan secara transparan dan berlapis melalui beberapa tahapan, termasuk wawancara dan penulisan makalah.

Panitia Seleksi yang dipimpin oleh Sekjen, bukan Menteri. Panitia seleksi mengusulkan 13 nama untuk mengisi posisi yang tercantum dalam seleksi terbuka. Berdasarkan hasil seleksi, Panitia Seleksi mengusulkan Sri Wahyuningsih dan Mulyatsah untuk mengisi jabatan Direktur SD dan Direktur SMP.

Tidak ada keterkaitan Menteri dalam hal ini dan Nadiem tidak pernah melakukan pencopotan maupun pengangkatan orang-orang terkait. Semua dilakukan secara transparan dan berlapis di bawah pimpinan Sekjen.

Terkait Kurikulum Merdeka atau Digitalisasi Pendidikan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyinggung rendahnya *Intelligence Quotient (IQ)* anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi salah satu bukti gagalnya program digitalisasi pendidikan era Nadiem. Bagaimana tanggapan Anda?

Isu IQ anak di wilayah 3T tidak relevan dalam menilai program digitalisasi pendidikan. Pengadaan TIK, termasuk Chromebook, pada saat Nadiem menjabat sebagai Menteri secara eksplisit ditujukan bagi sekolah yang memiliki listrik dan koneksi internet, bukan wilayah 3T, sebagaimana tertuang dalam juklak September 2020. Program ini difokuskan pada peningkatan proses belajar mengajar dan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) sesuai kerangka *Programme for International Student Assessment (PISA)*.

Selain itu, audit BPKP menunjukkan 86% murid menggunakan Chromebook untuk melaksanakan AKM dan data Kemendikbudristek menunjukkan bahwa 97%

Chromebook masih aktif digunakan. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan Chromebook tepat sesuai fungsinya.

Terkait Kewenangan Mendikbudristek

Apa benar Nadiem telah melanggar kewenangan pada pengadaan Chrome OS, karena tidak sesuai kebutuhan, termasuk mengatur dan mengarahkan proses pengadaan?

Kewenangan Nadiem berada pada ranah penetapan kebijakan umum di tingkat Kementerian. Dalam kerangka kebijakan tersebut, peran Nadiem sebatas menyetujui rekomendasi tim sesuai paparan dan mempersilakan tim melanjutkan kajian untuk mengonfirmasi rekomendasi tersebut.

Chrome OS pada awalnya dicanangkan sebagai bagian dari penguatan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan transformasi digital pendidikan. Namun, pandemi COVID-19 menuntut peralihan cepat ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sesuai arahan Presiden saat itu. Dalam situasi tersebut, hasil kajian berlapis tim Kemendikbudristek merekomendasikan Chrome OS sebagai sistem operasional yang paling sesuai dengan kebutuhan pembelajaran saat itu.

Apa benar ada permintaan dari pejabat Kemendikbudristek untuk wajib memilih Chrome OS daripada Windows OS?

Pernyataan yang menyebut adanya “Pejabat Kemendikbudristek” yang mewajibkan penggunaan Chrome OS pada 6 Mei 2020 bersifat umum dan perlu dibuktikan kebenarannya.

Pemilihan Chrome OS telah melalui evaluasi teknis, konsultasi, serta kajian tim internal bersama pejabat Dirjen PAUD Dikdasmen* yang juga mengkaji sistem operasi (OS) dari penyedia lain seperti Windows.

*PAUD Dikdasmen: Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Apakah benar Nadiem melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan produk dari Google, antara lain program Google for Education, Chromebook, dan Chrome OS, bagi peserta didik?

Dalam pertemuan pertama dengan Google pada 19 Februari 2020, Google membahas dukungan yang dapat mereka berikan untuk sektor pendidikan di Indonesia, salah satunya Chrome OS.

Pertemuan ini diinisiasi oleh Google, dihadiri oleh Nadiem, jajaran Kementerian, staf khusus, dan perwakilan Google.

Selain pertemuan dengan Google dengan total pertemuan sebanyak 3 kali, pada tahun 2020 Nadiem juga melakukan pertemuan dengan Microsoft sebanyak 4 kali dan pertemuan dengan Apple sebanyak 2 kali.

Terkait Dana CSR Google Partners Services Fund (PSF)

Benarkah Nadiem menerima keuntungan dari CSR* Google Partner Services Fund (PSF) atas pengadaan Chrome OS di Kemendikbudristek?

Tidak benar. Nadiem tidak pernah memperoleh keuntungan apapun dari Google Partner Services Fund (PSF) atas Penggunaan Chrome OS di Kemendikbud.

- PSF merupakan bagian dari tanggung jawab sosial (CSR) Google untuk mendorong inklusi digital melalui skema kemitraan (*co-investment*) dengan lembaga publik, dalam hal ini Kemendikbudristek.
- Pada 2020, Google memberikan dukungan PSF sekitar 30% dari biaya lisensi *device management*, namun dana disalurkan langsung ke vendor resmi pilihan Google, misalnya GITS dan REFO. Tidak melalui Kementerian maupun Nadiem secara pribadi.
- Dana yang disalurkan vendor Google kemudian digunakan untuk sejumlah program, seperti pelatihan guru dalam memanfaatkan teknologi pendidikan.

*CSR: Corporate Social Responsibility

Terkait Konflik Kepentingan Investasi Google di Gojek/PT AKAB/PT GI/GoTo

Pemilihan Chrome OS oleh Kemendikbudristek erat kaitannya dengan kepentingan Nadiem atas investasi dari Google ke Gojek. Hal tersebut terefleksikan dari *top-up* saham yang dilakukan Google. Besar kemungkinan Nadiem memperoleh keuntungan, karena masih memiliki saham di Gojek?

Tidak ada keuntungan yang diterima oleh Nadiem. Kekayaannya justru merosot 51%* saat menjabat Menteri.

Kepemilikan saham Nadiem di PT AKAB semakin menurun hingga 1,69% per Oktober 2021 dan Nadiem bukan merupakan pemegang saham pengendali. Tidak ada bukti bahwa Nadiem menerima keuntungan pribadi atau memperkaya pihak lain.

Tidak ada kaitan antara investasi Google di Gojek, baik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB)/PT Gojek Indonesia/PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo)/ dengan pemilihan Chrome OS di Kemendikbudristek.

- Sehari sebelum dilantik, Nadiem dengan sukarela melepaskan jabatannya sebagai Komisaris Utama di PT AKAB dan Direktur Utama di PT Gojek Indonesia serta menguasakan seluruh Hak Suara *super voting rights** dan *regular voting rights**** di PT AKAB.
- Dari 2017 hingga 2022, Nadiem tidak pernah menjual sahamnya di PT AKAB.
- Hampir 70% investasi Google di PT AKAB/GoTo terjadi di 2018, hampir 1,5 tahun sebelum Nadiem menjabat sebagai Menteri.
- Google berinvestasi di PT AKAB jauh sebelum Nadiem menjadi Menteri, yaitu

di April 2018.

- Google berinvestasi kembali pada tahun 2020 (7,04%) dan 2021 (4,72%) hanya merupakan langkah Google untuk menghindari dilusi**** karena penyusutan nilai saham akibat penambahan modal dari investor besar. Tidak ada hubungannya dengan pemilihan Chrome OS atau Chromebook di Kemendikbudristek.
- Selain Google, banyak investor besar lainnya yang juga berinvestasi di PT AKAB, seperti Sequoia, Tencent, Temasek, BlackRock, dan JD, yang menunjukkan bahwa investasi Google murni karena kinerja dan potensi Gojek sebagai perusahaan.

*Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

**Super Voting Rights: Hak suara lebih besar bagi pemegang saham tertentu untuk memengaruhi keputusan perusahaan

***Regular Voting Rights: Hak suara standar yang dimiliki pemegang saham dalam suatu perusahaan

****Dilusi: Berkurangnya persentase kepemilikan dan/atau nilai ekonomi saham investor yang sudah ada akibat penerbitan saham baru

Benarkah Nadiem meminta Google untuk berinvestasi di perusahaannya, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB), dengan total sebesar USD789.999.426 agar produk Google (seperti Google Cloud, Google Ads, Google Maps, dan Google Cloud Marketplace) dapat digunakan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dari pengadaan TIK sekitar Rp1,8 triliun?

Hampir 70% investasi Google di PT AKAB/GoTo terjadi di 2018, hampir 1,5 tahun sebelum Nadiem menjabat sebagai Menteri, sehingga tidak ada hubungan antara keputusan jabatan publik Nadiem dan investasi awal Google.

Google berinvestasi kembali pada tahun 2020 (7,04%) dan 2021 (4,72%) hanya merupakan langkah Google untuk menghindari dilusi**** karena penyusutan nilai saham akibat penambahan modal dari investor besar. Tidak ada hubungannya dengan pemilihan Chrome OS atau Chromebook di Kemendikbudristek.

Dari sisi tata kelola, setiap keputusan besar di PT AKAB harus mendapat persetujuan semua pemegang saham. Kepemilikan saham Nadiem selalu di bawah 5% dan bersifat minoritas. Di PT Gojek Indonesia, kewenangan RUPS** dan keputusan perusahaan juga dilimpahkan kepada direktur utama untuk menjaga independensi.

Transfer dana Rp809.596.125.000,- dari PT AKAB ke PT GI pada tahun 2021 murni transaksi korporasi internal GoTo.

- PT AKAB melakukan investasi tersebut melalui penerbitan saham baru PT GI, bukan pembelian saham secara langsung dari pemegang saham.
- Setelah akuisisi, mayoritas saham (99%) dikuasai PT AKAB, sedangkan kepemilikan pemegang saham lain, termasuk Nadiem, terdilusi hingga di bawah 1%.
- Dana sebesar Rp809 miliar tersebut langsung secara utuh dikembalikan oleh PT GI kepada PT AKAB untuk tujuan pelunasan utang.
- Transaksi ini adalah langkah administratif PT AKAB dalam menjalankan corporate governance sebelum pelaksanaan Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO) di tahun 2021.
- Berdasarkan dokumentasi korporasi, Nadiem tidak menerima sepeser pun dari

transaksi ini.

- Tidak ada pemilik saham perorangan yang diuntungkan, termasuk Nadiem.
- Transaksi ini tidak ada hubungan sama sekali dengan Google, Chromebook, Chrome OS, maupun Kemendikbudristek.

Dari 2017 hingga 2022, Nadiem tidak pernah menjual sahamnya di PT AKAB.

Dari sisi bisnis, keuntungan yang diterima Google dari lisensi vendor laptop nilainya sangat kecil, bahkan jauh di bawah 5% dari total investasi Google di PT AKAB. Kepemilikan saham Google juga bukan mayoritas, hanya sekitar 3,7%–7% sepanjang 2018–2021, sehingga tidak bisa dianggap sebagai imbal balik investasi.

*Dilusi: Berkurangnya persentase kepemilikan dan/atau nilai ekonomi saham investor yang sudah ada akibat penerbitan saham baru

**RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham

Apa benar kekayaan Nadiem meningkat tajam menjadi Rp5,5 triliun saat menjabat sebagai Menteri, yaitu pada tahun 2022?

Kekayaan Nadiem justru merosot 51%* saat menjabat Menteri. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Nadiem melaporkan nilai kekayaannya menurun berturut-turut di dua tahun terakhir dengan detail sebagai berikut:

- **2021:** Nilai kekayaan sebesar Rp1.175.047.616.596,-
- **2022:** Nilai kekayaan sebesar Rp4.871.469.603.758,-
- **2023:** Nilai kekayaan sebesar Rp906.057.161.325,-
- **2024:** Nilai kekayaan sebesar Rp600.641.456.655,-

Sebagian besar kekayaan yang tercantum dalam LHKPN tersebut berasal dari surat berharga, terutama saham di PT GoTo, yang telah dimiliki Nadiem jauh sebelum menjabat sebagai Menteri.

Peningkatan nilai kekayaan pada tahun 2022 menjadi Rp4,8 triliun disebabkan oleh *Initial Public Offering* (IPO) yang dilakukan oleh PT GoTo pada April 2022, yang secara alami meningkatkan valuasi saham di pasar. Akibatnya, nilai saham yang telah dimiliki Nadiem sebelumnya turut mengalami kenaikan.

Kenaikan tersebut bukan merupakan pendapatan tunai, melainkan nilai kenaikan saham di atas kertas yang sewaktu-waktu dapat berubah (naik atau turun) sesuai kondisi pasar.

*Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Terkait Program dan Kinerja Nadiem Makarim

Bagaimana tanggapan Anda terkait Nadiem yang dinilai tidak punya pengalaman apapun di bidang pendidikan?

Keberhasilan Nadiem sebagai Mendikbudristek tidak hanya bergantung pada latar belakang akademik di dunia pendidikan, tetapi juga pada kompetensi, kemampuan manajerial, serta keahlian merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang solutif dan inovatif dalam menghadapi tantangan pendidikan di Indonesia. Latar belakang pendidikan Nadiem di dalam dan luar negeri, ditambah dengan pengalaman luas di bidang teknologi dan manajemen *startup*, menjadi modal penting dalam mendorong digitalisasi pendidikan, inovasi kurikulum, dan pembelajaran berbasis teknologi.

Selain Nadiem, ada juga beberapa Menteri dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman berbeda dengan Kementerian yang dipimpin, seperti Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan dengan latar belakang pendidikan Fisika Nuklir dan pengalaman di industri perbankan), Agus Harimurti Yudhoyono (Menteri Agraria dan Tata Ruang dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman di Militer), dan masih banyak lainnya.



Kebijakan dan Pencapaian Nadiem Makarim

Di bawah kepemimpinan Nadiem, sektor pendidikan mencatat terobosan signifikan: **Hampir 800 ribu guru honorer diangkat menjadi ASN PPPK** serta **transformasi menyeluruh lewat Merdeka Belajar & Kampus Merdeka** yang meningkatkan akses, fleksibilitas, dan kualitas pendidikan bagi siswa dan tenaga pendidik.

Rekrutmen/penempatan guru menjadi ASN (PPPK)

774.999 guru honorer (61% dari target 1 juta) diangkat menjadi PPPK pada 2021-2023, rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Kebijakan pencegahan & penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi

Penerbitan Permendikbudristek No.30/2021 untuk mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Program Guru Penggerak

Program pelatihan kepemimpinan dan pelatihan teknologi melibatkan ribuan guru untuk mencetak pemimpin berbasis komunitas praktik.

Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan

Program ini memungkinkan guru untuk mendapatkan sertifikasi secara cepat melalui online, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan para guru

Program Awan Penggerak

Sistem peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang dapat diakses secara *offline* (tanpa internet) agar para guru dapat mengakses konten belajar dari Platform Merdeka Mengajar, perangkat ajar, dan pelatihan.

Program Buku Bacaan Berkualitas

Distribusi jutaan buku bacaan ke sekolah-sekolah serta memberikan pelatihan berbagai metode membaca aktif untuk meningkatkan kemampuan literasi anak-anak Indonesia.

Kampus Merdeka (MBKM)

Fleksibilitas belajar melalui magang, pertukaran, studi independen bersertifikat, transfer kredit lintas Perguruan Tinggi, dan kolaborasi industri yang [hingga 2024 diikuti oleh setidaknya 725 ribu mahasiswa dari 1.300 Perguruan Tinggi](#).

Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM)

Sub-program MBKM yang memberi kesempatan mahasiswa belajar di universitas lain selama 1 semester untuk pengalaman akademik dan lintas-kultural. Hingga kini masih berlanjut dengan [total 96.298 mahasiswa dari empat angkatan](#).

Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB)

Bertujuan untuk menyiapkan lulusan lebih siap kerja dengan pengalaman nyata yang telah diikuti [128.463 alumni sejak 2021](#).



Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)

Hingga 2024, sekitar 6.823 mahasiswa mendapatkan beasiswa belajar satu semester di [140–150 universitas di ~30 negara](#).

Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK)

Dilaksanakan di puluhan ribu sekolah, ANBK menilai literasi, numerasi, karakter, dan lingkungan belajar. Data ANBK menjadi alat diagnosis mutu pendidikan yang membantu sekolah dan pemerintah merancang perbaikan tepat sasaran.

Capaian Nadiem saat menjadi CEO Gojek

Saat diberi amanah jadi Mendikbudristek, Nadiem tengah di puncak karir sebagai CEO Gojek, perusahaan yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia:

- [Menyumbang sekitar US \\$7,1 miliar ke perekonomian Indonesia pada 2019](#).
- [Memiliki “lebih dari 1 juta mitra pengemudi”](#) saat Nadiem memimpin, dan hingga 2024 telah memberdayakan [lebih dari 3 juta mitra pengemudi serta lebih dari 5,3 juta mitra usaha \(UMKM\)](#).

